





pembayaran tangguh atau pembayaran berjangka dikarenakan keterbatasan dana, pada penelitian ini justru hal yang menjadi alasan masyarakat melakukan praktik jual beli dengan sistem pembayaran berjangka adalah untuk mengharapkan keuntungan lebih dari hasil transaksi yang dilakukan.

Jual beli dengan sistem pembayaran berjangka ini juga dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Gambaran sementara praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo ini adalah jual beli antara seorang pemilik sapi dengan juragan sapi, dimana objek yang diperjualbelikan dalam transaksi tersebut adalah sapi dan menggunakan sistem pembayaran berjangka atau masyarakat Desa Takerharjo menyebutnya dengan istilah jual beli sapi dengan cara diutangkan. Pemilik sapi adalah seseorang yang akan menjual sapi kepada juragan sapi dengan cara menghutangkan sapi terlebih dahulu kepada juragan dan kemudian pembayarannya akan dilakukan di lain waktu yang telah disepakati, sedangkan juragan sapi adalah seseorang yang akan membeli sapi dari pemilik sapi dan juga seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk melunasi pembayaran sapi pada hari yang telah disepakati.

Umumnya, masyarakat Desa Takerharjo memilih jual beli dengan sistem pembayaran berjangka adalah karena harga jual dengan sistem pembayaran berjangka lebih tinggi dibandingkan harga sistem tunai, selain itu masyarakat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya pertanian, biaya hajatan, biaya sekolah, dan lain



bahwa pemilik sapi dapat mengambil uangnya apabila jangka waktu yang disepakati sudah jatuh tempo. Adapun jangka waktu pelunasan terdapat sistem mingguan yang dikhususkan untuk sesama juragan sapi dan jagal sapi, sedangkan sistem bulanan untuk pemilik sapi perorangan dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan hingga 4 bulanan. Dalam jangka-jangka itulah juragan harus melunasi pembayaran atas hutangnya kepada pemilik sapi apabila jangka waktu pembayaran yang disepakati kedua pihak telah berakhir. Jika dalam kurun waktu yang telah ditentukan juragan sapi tidak dapat melunasi hutangnya pada pemilik sapi, maka juragan sapi harus mendatangi pemilik sapi untuk meminta tambahan jangka waktu dan meminta maaf agar pemilik sapi tidak merasa kecewa atas keterlambatan pembayaran tersebut.

Mengenai pelunasan pembayaran, sesekali juragan sapi juga pernah mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut dikarenakan juragan sapi hanya memperoleh keuntungan kecil dari penjualan sapi-sapi yang dimiliki. Selain itu, apabila dalam jangka waktu yang telah disepakati juragan tidak mampu menjual sapi-sapi yang dijual kepadanya dengan sistem pembayaran berjangka di atas harga yang dijanjikannya, maka juragan harus membayar tambahan harga yang telah disepakati dengan uang milik pribadi. Akan tetapi, dalam masalah ini pemilik sapi dan juragan tidak memberlakukan adanya tambahan harga jika terjadi keterlambatan dalam pelunasan, keduanya sepakat dengan ketentuan harga diawal. Juragan sapi hanya meminta maaf













menyatakan, bahwa praktik hutang uang dengan sistem jual beli dari piutang di Desa Sawo Babat Lamongan dilakukan oleh sebagian warga yang bertindak sebagai berhutang dan berpiutang sekaligus sebagai penjual dan pembeli adalah ibu-ibu rumah tangga, yang terdapat batasan waktu dalam pengembalian hutang selama 3 bulan. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap transaksi tersebut adalah sah karena telah memenuhi syarat-syarat dalam utang piutang menurut hukum Islam dan masih sejalan dengan aturan dalam prinsip-prinsip utang piutang Islam.<sup>7</sup>

2. Diffatussunnah Riadinna, 2016, dengan judul *“Analisis Fikih Mazhab Syafi’i terhadap Perubahan Harga Sepihak: Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang”*. Dalam penelitian ini menyatakan, bahwa praktik jual beli daging sapi di Desa Omben dilakukan oleh seorang pembeli yang memesan daging sapi kepada *supplier* pada malam hari sebelum sapi disembelih, melalui sms atau telepon dengan menyebutkan perkilo gramnya yang kemudian *supplier* menyebutkan harga perkilo gramnya. Dan apabila esok hari daging yang dikirimkan *supplier* kepada pembeli tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli dengan semauanya sendiri mematok harga perkilo gramnya atau jika daging tersebut sampai fatal tidak sesuai dengan keinginan pengecer maka pengecer akan mengembalikan kepada *supplier*. Berdasarkan hasil analisis, jual beli tersebut dianggap sah atau lazim

---

<sup>7</sup> Nurul Nisfu Suci Rofikhoh, “Tinjaun Hukum Islam terhadap Utang Uang dengan Sistem Jual Beli Barang (Murabahah) dari Piutang di Desa Sawo Babat Lamongan”,(Skripsi--IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008).

apabila penjual dan pembeli tersebut rela, dan jual beli tersebut dapat dikatakan fasid atau rusak apabila *supplier* tidak rela (terpaksa) atau merasa berat hati menjual daging sapi tersebut daripada tidak terjual atau ruginya semakin besar.<sup>8</sup>

3. Erfa Erfiana, 2016, dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan*”. Dalam penelitian ini menyatakan, bahwa jual beli yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan adalah praktik jual beli yang terdapat adanya tenggang waktu dan sebuah syarat, yang mana jual beli tersebut hanya berlaku selama tenggang waktu yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dan syarat yang terdapat dalam jual beli ini yaitu selama barang ada di pihak pembeli, maka pembeli tidak boleh menjualnya kepada siapapun selain penjual. Setelah waktu yang ditentukan keduanya tiba, maka barang yang ditentukan keduanya telah tiba, maka barang yang diperjualbelikan kembali dibeli oleh penjual sesuai dengan penjualan harga semula.<sup>9</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian yang dilakukan penulis memiliki persamaan dari segi praktik yang sama-sama menggunakan jangka

---

<sup>8</sup> Diffatussunnah Riadinna, “Analisis Fikih Mazhab Syafi’i terhadap Perubahan Harga Sepihak: Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

<sup>9</sup>Erfa Erfiana, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”, (SKRIPSI--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016).



























Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, yang mana merupakan langkah awal dari sebuah skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian teori, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bab tinjauan umum jual beli dalam Islam, yakni merupakan teori yang digunakan sebagai bahan analisis permasalahan yang telah diteliti. Adapun tinjauan umum mengenai teori jual beli penulis gambarkan sebagai berikut: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat dalam jual beli, penambahan harga berdasarkan waktu proses transaksi, jual beli dengan harga cicilan, persyaratan-persyaratan untuk keabsahan akad jual beli kredit, jual beli dengan uang muka, manfaat jual beli, kesaksian dalam akad jual beli, etika jual beli, khiyar dalam jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli yang dilarang.

Bab ketiga, yakni praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Bab ini merupakan sebuah deskripsi gambaran umum dari keadaan tempat penelitian dan praktik jual beli sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli sapi dengan sistem pembayaran berjangka di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. Bab ini merupakan gambaran dari bab II dan bab III, yakni penggabungan antara teori dengan permasalahan yang ada demi

